

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Cita-cita pendidikan nasional sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga sekarang, nuansa nilai-moral, akhlak atau karakter senantiasa melekat dan menjadi bagian integral dari pendidikan nasional. Meskipun pendidikan tersebut memiliki istilah yang berbeda namun memiliki esensi yang sama yakni membina sikap dan perilaku dan ternyata pada setiap rumusan tujuan pendidikan nasional esensi tersebut selalu ada.

Seperti dalam rumusan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 bahwa pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab, kemudian Kementerian PPK merumuskan "... mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat" (Hakam, 2010 : 1). Demikian pula Undang-undang (UU) No, 4 tahun 1950 Bab II Pasal 3 jo. UU No. 12 Tahun 1954 menegaskan tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Undang-undang No. 12 tahun 1945 yang dilengkapi dengan keputusan Presiden RI No 145 tahun 1965 mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur spiritual maupun materil dan yang berjiwa Pancasila. Ketetapan MPR No IV/MPR/1973 memberikan penjelasan tentang

pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Sesuai dengan hakekat pembangunan yang menekankan kepada “Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia”. Kemudian dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (Sumantri, 2010: 2-3)

Tujuan pendidikan nasional terakhir diungkapkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bab II pasal 3 yang menyatakan:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Rumusan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional seperti tergambar di atas dari tahun ke tahun tampak nyata bahwa pendidikan nasional yang utama dan dominan adalah pendidikan karakter. Dari tujuan pendidikan nasional tampak jelas bahwa yang melandasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila, termasuk yang tersurat dan

tersirat di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Dari sini dapat dipahami bahwa jiwa atau roh pendidikan nasional itu sesungguhnya adalah pembentukan karakter atau kepribadian bangsa yang berakar pada nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kebudayaan nasional, nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam pertumbuhan dan perkembangan jaman.

Selain tujuan pendidikan nasional yang secara historis konstitusional senantiasa memiliki prinsip-prinsip nilai-moral, ada sejumlah mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi tersebut antara lain Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Pancasila. Secara historis kurikulum, Winataputra (Hakam, 2010: 3) mengidentifikasi perubahan-perubahan nama mata pelajaran pada setiap kurikulum yaitu; mata pelajaran Civics (Kurikulum 1957/1962); Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi dan kewarganegaraan (Kurikulum 1964); Pendidikan Kewarga Negara, yang merupakan perpaduan ilmu bumi, sejarah Indonesia, dan civics (Kurikulum 1968/1969); Pendidikan Kewargaan Negara, Civics & Hukum (1973); Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn (Kurikulum 1994), serta Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn (Kurikulum 2006/ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP)

Secara teoritis, hadirnya perundang-undangan sistem pendidikan nasional dan mata pelajaran-mata pelajaran yang memiliki misi membangun karakter, akhlaq atau nilai-moral, seharusnya berpengaruh terhadap moral masyarakat terutama peserta didik. Namun secara kasat mata kita menyaksikan betapa masih lebarnya kesenjangan antara konsep dan muatan nilai yang tercermin dalam

sumber-sumber normatif konstitusional dengan fenomena sosial, kultural, politik, ideologis dan religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sampai dengan saat ini. Dalam media cetak, televisi dan jaringan internet kita menyaksikan kondisi paradoksal antara nilai dan fakta, seperti tindak kekerasan, pelanggaran lalulintas, kebohongan publik kasus narkoba yang semakin subur, pertikaian bersenjata antar kelompok massa, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pornografi dan pornoaksi yang makin vulgar ditunjukkan oleh kalangan muda hingga elit politik. Di samping itu hubungan sek bebas yang makin menjangkiti kalangan generasi muda, siswa dan mahasiswa, tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di mana-mana, serta kasus mafia hukum, peradilan, dan mafia pajak. Munculnya gerakan terorisme oleh salah satu kelompok masyarakat Indonesia sendiri, tidak kalah hebohnya kasus *money politics* dalam pilkada dan pemilu legislatif, pencemaran dan kehancuran lingkungan ekologis. Pamer kekayaan yang makin tajam oleh kelompok kaya terhadap kelompok miskin, kasus penggusuran kelompok miskin di kota-kota besar. Semua fenomena tersebut mengindikasikan belum berhasilnya pendidikan nilai-moral secara memuaskan baik dipersekolahan maupun di luar persekolahan.

Data hasil survey KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2010, sebanyak 32 % remaja usia 14 – 18 tahun di kota-kota besar di Indonesia pernah berhubungan seks. Kota-kota besar yang dimaksud tersebut antara lain Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Data survei KPAI mengemukakan bahwa salah satu pemicu utama dari perilaku remaja tersebut adalah muatan pornografi yang diakses via internet. Fakta lainnya yang juga mencengangkan adalah sekitar

21,2% remaja putri di Indonesia pernah melakukan aborsi. Selebihnya, separuh remaja wanita mengaku pernah bercumbu ataupun melakukan oral seks. Survei yang dilakukan KPAI tersebut juga menyebutkan, 97% perilaku seks remaja diilhami pornografi di internet. (<http://syiahali.wordpress.com/revolusi-seks-bebas-di-indonesia-yang-coba-digagalkan-syiah/> diakses tanggal 22 November 2011).

Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 2010 menunjukkan, 51 persen remaja di Jabodetabek telah melakukan seks pra nikah, artinya dari 100 remaja, 51 orang sudah tidak perawan. Hasil lain dari survey Komnas Perempuan tahun ini, siswa SMP dan SMU ternyata 93,7 persen pernah melakukan ciuman. 21,2 persen remaja SMP mengaku pernah aborsi, dan 97 persen remaja SMP dan SMU pernah melihat film porno. Kepala BKKBN Sugiri Syarif ketika memperingati Hari AIDS sedunia 2010 juga menuturkan beberapa wilayah di Indonesia, seks pra nikah juga dilakukan beberapa remaja. Misalnya saja di Surabaya tercatat 54%, di Bandung 47%, dan 52% di Medan. Data Kemenkes pada akhir Juni 2010 terdapat 21.770 kasus AIDS dan 47.157 kasus HIV positif dengan persentase pengidap usia 20-29 tahun yakni 48,1 persen dan usia 30-39 tahun sebanyak 30,9 persen. (<http://heniputra.com/pergaulan-bebas-ancam-martabat-perempuan.html/> diakses 22 November 2011).

Penelitian di 5 SMK-IT Bogor (GMSK-IPB) dalam Megawangi (2003) menunjukkan hasil yang mengejutkan, yaitu: 30,3% dari responden terlibat minuman keras, 15,4% pecandu narkoba, 34,6% berjudi/taruhan, 68% menonton

film porno (blue film), pernah melakukan hubungan seks, 81% sering membohongi orang tua, 25% menjadi anggota geng motor.

Data tentang korupsi, dari hasil riset yang dilakukan dalam *Transparency Internasional Corruption Perceptions Index 2009*, masih menempatkan Indonesia pada peringkat yang sangat memprihatinkan. Tindak penyalahgunaan narkoba dijelaskan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2009 tercatat adanya 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia, dan 41 persen di antara mereka pertama kali mencoba narkoba di usia 16-18 tahun, yakni usia remaja SMP-SMU (Republika online, 26/6/2009).

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat galau terhadap kondisi yang dialami Bangsa Indonesia dalam hal moral, etika, dan akhlak bangsa. Pernyataannya hampir berturut-turut disampaikan dalam tiga kesempatan, seperti ketika menghadiri acara peringatan Isra Mikraj pada 9 Juli 2010, acara Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2010, dan terakhir Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia pada 25 Juli 2010. SBY mensinyalmen bahwa kondisi akhlak bangsa sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bahkan, dengan tegas, SBY menyatakan bahwa kondisi akhlak bangsa ini sudah mencapai tingkat tragedi yang mengerikan. Karena itu, SBY dalam kesempatan berbicara di hadapan para ulama pada acara Munas VIII dan Milad ke-35 Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpidato dengan judul “Saatnya Indonesia Bangkitkan Kembali Peradaban Islam” yang meliputi tiga hal penting. *Pertama*, kebangkitan kembali peradaban Islam di Indonesia terkait dengan arah modernisasi negara. *Kedua*, tragedi akhlak yang melanda sebagian masyarakat

yang berupa perilaku yang sangat menyimpang dan menodai nilai-nilai agama serta kesusilaan yang dikaitkan dengan penyebab utama. *Ketiga*, masalah kebebasan dan hak yang tanpa batas. Kegagalan SBY memang cukup beralasan. Pasalnya, potret bangsa ini setelah memasuki era reformasi menunjukkan tingkah laku yang jauh menyimpang dari nilai-nilai moral, kesusilaan, dan keagamaan.

Memperhatikan situasi dan kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengambil inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan karakter bangsa melalui Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025 dengan tema membangun generasi Indonesia yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010: 4) Pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan karakter sebagai bagian integral dari keseluruhan tatanan sistem pendidikan nasional harus dikembangkan dan dilaksanakan secara sistemik dan holistik dalam tiga pilar nasional pendidikan karakter, yakni satuan pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, satuan/program pendidikan nonformal), keluarga (keluarga inti, keluarga luas, keluarga orang tua tunggal), dan masyarakat (komunitas, masyarakat lokal, wilayah, bangsa, dan negara).

Pendidikan karakter di sekolah hendaknya dimulai dari Taman Kanak-kanak, karena masa anak merupakan fase yang sangat fundamental bagi perkembangan individu dimana pada fase ini terjadinya peluang yang sangat besar untuk pembentukan dan pengembangan pribadi seseorang. Menurut Froebel, (Kemendiknas, 2010: 5) jika orang dewasa mampu menyediakan suatu “taman” yang dirancang sesuai dengan potensi dan bawaan anak, maka anak akan berkembang secara wajar. Dengan menggunakan istilah lain Lickona (1994; 13) mengemukakan: “*A Child is the only known substance from which a responsible adult can be made*” “Seorang anak adalah satu-satunya “bahan bangunan” yang diketahui dapat membentuk seorang dewasa yang bertanggung jawab”. Artinya bahwa, rentang usia dini merupakan saat yang tepat dalam mengembangkan seluruh potensi dan kecerdasan yang dimiliki anak. Agar hal tersebut tercapai diperlukan sistem pendidikan dini holistik yang menyentuh seluruh domain (kognitif, afektif dan psikomotor) anak.

Sistem pendidikan dini yang ada saat ini terlalu berorientasi pada pengembangan otak kiri (*kognitif*) dan kurang memperhatikan pengembangan otak kanan (afektif, empati, dan rasa). Sebagaimana diungkapkan oleh seorang konsultan pendidikan anak usia dini dari Bank Dunia Karin Villien (Kemendiknas, 2010: 4) bahwa kegiatan pembelajaran TK di Indonesia lebih bersifat akademik dimana anak-anak lebih banyak duduk di bangku seperti di sekolah dasar. Menurutnya, jarang sekali anak diberi kesempatan bereksplorasi dan melakukan sendiri apa yang diminati. “Banyak guru yang kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk berikir (*children must learn how to think*) dan

guru kurang memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan perasaannya dan menemukan pemecahan masalah sendiri”.

Rendahnya kesempatan yang dimiliki anak untuk mengalami, menemukan, membangun sendiri dan mencoba menyelesaikan suatu persoalan yang ditemukan anak dari lingkungannya membuat anak tidak berkembang sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Ditambah lagi dengan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi anak selama proses pembelajaran berlangsung akan semakin “memasung” kemampuan anak. Padahal masa TK merupakan masa keemasan dan yang akan mempengaruhi masa-masa berikutnya. Untuk memenuhi harapan tersebut maka diperlukan model pendidikan karakter yang dapat mengembangkan seluruh potensi (kognitif, afektif, dan psikomotor) anak serta menanamkan dan membiasakan nilai-nilai karakter sejak usia dini.

Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa TKA Al-Mukhlisin di Cibodas Lembang telah melaksanakan pendidikan holistik berbasis karakter pada siswa-siswanya, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang model rujukan, metode, hasil, dan kendala serta solusi pendidikan karakter dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter pada anak usia dini”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana implementasi pendidikan

karakter pada anak usia dini di TK Al-Mukhlisin Cibodas Lembang?”

Rumusan masalah ini, dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

- 1) Model Pendidikan Karakter seperti apa yang dijadikan rujukan oleh TKA Al-Mukhlisin dalam mengimplementasikan pendidikan karakter?
  - a) Tujuan model pendidikan karakter
  - b) Nilai-nilai Karakter
- 2) Bagaimana implementasi model pendidikan karakter pada anak usia dini di TKA Al-Mukhlisin Cibodas Lembang?
  - a) Perencanaan
  - b) Metode
  - c) Kegiatan Pembelajaran
  - d) Teknik Evaluasi
  - e) Hasil Pendidikan Karakter
- 3) Bagaimana hasil pendidikan karakter di TKA Al-Mukhlisin Cibodas Lembang?
- 4) Bagaimana kendala dan solusi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di TKA Al-Mukhlisin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memperoleh gambaran tentang model pendidikan karakter yang menjadi rujukan di TK Al-Mukhlisin.
  - a) Tujuan model pendidikan karakter
  - b) Nilai-nilai rujukan

- 2) Untuk memperoleh gambaran tentang implementasi pendidikan karakter pada anak usia dini di TKA Al-Mukhlisin Cibodas Lembang.
  - a) Perencanaan pendidikan karakter
  - b) Langkah-langkah Implementasi pendidikan karakter
  - c) Metode Pendidikan Karakter
  - d) Teknik Evaluasi
  - e) Hasil Pendidikan Karakter
- 3) Untuk memperoleh gambaran tentang hasil pendidikan karakter di TKA Al-Mukhlisin Cibodas Lembang.
- 4) Untuk memperoleh gambaran tentang kendala dan solusi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di TKA Al-Mukhlisin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap informasi yang bermanfaat melalui pengkajian konseptual maupun temuan-temuan otentik di lapangan, sehingga dapat mengembangkan bahan-bahan pemikiran yang bermanfaat baik untuk keperluan teoritis (ilmiah), maupun untuk keperluan praktis guna lebih memahami persoalan-persoalan dalam menginternalisasikan pendidikan karakter.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoretis: berguna bagi peningkatan kualitas pendidikan dalam membentuk karakter siswa melalui pendidikan karakter di Taman Kanak-kanak.
2. Secara praktis:

- a. dapat memberi masukan kepada guru di sekolah yang diteliti tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang telah dilakukan khususnya mengenai pendidikan karakter kepada peserta didik.
- b. memberi masukan pada sekolah yang bersangkutan dalam meningkatkan mutu pendidikan karakter yang hendak dicapai, sehingga dapat dijadikan contoh bagi sekolah lain untuk melaksanakan pendidikan karakter seperti di sekolah yang penulis teliti.
- c. hasil penelitian dapat dijadikan masukan kepada dinas pendidikan dalam mengembangkan pendidikan karakter kepada siswa sehingga pendidikan karakter dapat diterapkan di setiap jenjang pendidikan terutama pendidikan anak usia dini.
- d. bagi peneliti dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keilmuan khususnya dalam hal pendidikan karakter serta dapat mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam membina moral siswa, khususnya siswa di tingkat pendidikan anak usia dini.

#### **E. Struktur Organisasi**

Bab pertama pada penelitian ini diawali dari latar belakang masalah yaitu adanya distorsi antara konsep dan muatan nilai yang tercermin dalam sumber-sumber normatif konstitusional dengan fenomena sosial, kultural, politik, ideologis dan religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti pergaulan bebas dikalangan remaja, narkoba, gang motor, perilaku korupsi dikalangan elit politik, tawuran antar pelajar. Hal ini terjadi diakibatkan oleh sistem pendidikan yang ada sekarang ini terlalu berorientasi pada

pengembangan otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan pengembangan otak kanan (afektif, empati, dan rasa), dan pengembangan karakter merupakan optimalisasi fungsi otak kanan yang harus dimulai dari anak usia dini. Oleh karena itu diperlukan sebuah model pendidikan karakter dan implementasinya.

Keberadaan TKA Al-Mukhlisin Cibodas Lembang diketahui telah mengadopsi dan mengimplementasikan model pendidikan holistik berbasis karakter sehingga hal ini perlu dikaji keberadaan dan keberhasilannya melalui sebuah penelitian dengan menyusun rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab dua merupakan kajian pustaka yang berisi berbagai teori dari beberapa pakar tentang karakter, pendidikan karakter, pendekatan dan metode pendidikan karakter, karakteristik anak usia dini, model pembelajaran anak usia dini, pendidikan karakter pada anak usia dini, Pendidikan karakter dalam pendidikan umum. Teori-teori tersebut akan menjadi “pisau” analisis dalam pembahasan di bab IV.

Pada bab tiga, penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan, sumber dan jenis data, instrumen penelitian, sampling, sampai pada teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas. Melalui metode penelitian inilah penulis dapat mendesain sebuah penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dapat tercapai. Sedangkan bab empat berisi hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah. Penelitian ini berakhir pada bab lima yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.